



Asisten Administrasi Umum Setda Kota Jogja, Dedi Budiono (tengah) bersama sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) berfoto bersama sesuai menerima penghargaan ajang Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY 2025 di Gedhong Pracimasan kompleks Keparthan, Kamis (27/11).

► KINERJA PEMERINTAH

Pemkot Raih 11 Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja meraih predikat terbaik pertama kategori Pemerintah Kabupaten/Kota di ajang Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY 2025. Penghargaan diserahkan Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, diterima Asisten Administrasi Umum Setda Kota Jogja, Dedi Budiono, di Gedhong Pracimasan kompleks Keparthan, Kamis (27/11).

Pemkot Jogja juga menerima penghargaan untuk kategori OPD Pemerintah Kabupaten/Kota dengan kualifikasi informatif untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan skor 92,25; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil skor 91,65; Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian skor 90,9; Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Jogja skor 90,2; Kemantren Wirobrajan skor 92,65; dan Kemantren Gondomanan skor 90,15. Kemantren Wirobrajan juga menjadi yang terbaik kategori Kemantren/Kapanewon dengan skor 92,65.

Selain itu, Pemkot juga menerima

penghargaan untuk kategori Badan Publik Ramah Difabel. Ada juga penghargaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Berprestasi yang diraih Pemkot Jogja; Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian; serta Kemantren Wirobrajan, sehingga total ada 11 penghargaan yang diraih Pemkot Jogja.

Dedi Budiono menyatakan apresiasi ini menjadi bukti komitmen Pemkot Jogja dalam menjamin akses informasi bagi masyarakat. "Penghargaan ini membuktikan bahwa layanan di Pemkot Jogja sudah transparan. Artinya, seluruh tata kelola pemerintahan dapat diakses oleh masyarakat," ujar Dedi seperti dilansir jogjakota.go.id, Kamis.

Pemkot, menurut Dedi, menyediakan data publik secara lengkap melalui web perangkat daerah, termasuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan capaian layanan pemerintahan. "Informasi

yang tidak dikecualikan boleh diketahui masyarakat. Di website OPD sangat lengkap, termasuk LHKPN pejabat dan capaian layanan. Penghargaan ini membanggakan, tetapi juga menjadi pemicu semangat kami untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi publik," tuturnya.

Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan hak publik yang wajib difasilitasi pemerintah secara bertanggung jawab. "Informasi publik adalah hak. Tugas pemerintahan adalah memastikan hak itu dapat diakses dengan cara mudah, cepat, dan bertanggung jawab," katanya. Ia menekankan bahwa transparansi tidak selalu identik dengan keterbukaan sepenuhnya. "Transparansi hanya mengizinkan pemerintah memilih informasi apa yang ingin disampaikan. Tetapi keterbukaan mengingatkan bahwa informasi publik bukan milik institusi, melainkan masyarakat." (Yudhi Kusdiyanto*)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005